PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jl. Mastrip No.7 Nganjuk Kode Pos 64419
Telp./Fax. (0358) 330055 Email : dinas.prkpp@nganjukkab.go.id

DOKUMEN
EVALUASI ATAS RENCANA AKSI
TRIBULAN III TAHUN 2023



DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023

Evaluasi Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk
Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	**Tujuan :** Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan pemukiman	Persentase peningkatan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	86,15%	67,95%	74,27%
2	**Sasaran :** Meningkatnya perumahan dan permukiman yang layak huni	Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh	58,50%	18,08%	30,80%
		Persentase ketersediaan rumah layak huni	93,21%	85,76%	92,01%
	Meningkatnya penyelesaian masalah pertanahan	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan dalam Kabupaten	100%	100%	100%

Evaluasi Rencana Aksi Kegiatan

DOKUMEN EVALUASI TARGET DAN REALISASI RENCANA AKSI TAHUN 2023

Tribulan III

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	N O	PROGRAM	TARGET (%) Tribulan III	REALISASI (%) Tribulan III
1	Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni	Persentase pengurangan backlog rumah	1	Program Pengembangan Perumahan	25%	41,25%
		Persentase pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	2	Program Kawasan Permukiman	27%	38,10%
		Persentase perbaikan rumah dan kawasan permukiman kumuh	3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	25%	1,58%
		Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	30%	30,47%
		Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman yang ditingkatkan	5	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	30%	0,00%
2	Meningkatnya Penyelesaian Masalah Pertanahan	Presentase Sengketa Tanah Garapan yang Terselesaikan	6	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	30%	3,13%
		Persentase perencanaan penggunaan tanah	7	Program Penatagunaan Tanah	25%	9,85%

PEMBAHASAN HASIL EVALUASI RENCANA AKSI 2023 PADA TRIBULAN III :

1. Sasaran Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni dengan indikator Persentase pengurangan backlog rumah dengan target pada tribulan III sebesar 25% dan sudah terealisasi sebesar 41,25%, sehingga capaian kinerja rencana aksi tersebut sebesar 165,00% dan didukung dengan rencana aksi kegiatan yaitu :
   a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
   b. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
   c. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
   d. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
   e. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB).

2. Sasaran Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni dengan indikator Persentase pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dengan target pada tribulan III sebesar 27% dan sudah terealisasi sebesar 38,10%, sehingga capaian kinerja rencana aksi tersebut sebesar 141,11% dan didukung dengan rencana aksi kegiatan yaitu :
   a. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
   b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

3. Sasaran Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni dengan indikator Persentase perbaikan rumah dan kawasan permukiman kumuh dengan target pada tribulan III sebesar 25% dan sudah terealisasi sebesar 1,58%, sehingga capaian kinerja rencana aksi tersebut sebesar 6,32% dan didukung dengan rencana aksi kegiatan yaitu :
   a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota.

4. Sasaran Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni dengan indikator Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU dengan target pada tribulan III sebesar 30% dan sudah terealisasi sebesar 30,47%,

sehingga capaian kinerja rencana aksi tersebut sebesar 101,57% dan didukung dengan rencana aksi kegiatan yaitu:

a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

5. Sasaran Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni dengan indikator Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman yang ditingkatkan dengan target pada tribulan III sebesar 20% dan sudah terealisasi sebesar 0,00%, sehingga capaian kinerja rencana aksi tersebut sebesar 0,00% dan didukung dengan rencana aksi kegiatan yaitu :

   a. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil.

6. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Masalah Pertanahan dengan indikator kinerja Presentase Sengketa Tanah Garapan yang Terselesaikan dengan target pada tribulan III sebesar 30% dan sudah terealisasi sebesar 3,13%, sehingga capaian kinerja rencana aksi tersebut sebesar 10,43% dan didukung dengan rencana aksi kegiatan yaitu :

   a. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

7. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Masalah Pertanahan dengan indikator kinerja Persentase perencanaan penggunaan tanah dengan target pada tribulan III sebesar 25% dan sudah terealisasi sebesar 9,85%, sehingga capaian kinerja rencana aksi tersebut sebesar 39,40% dan didukung dengan rencana aksi kegiatan yaitu :

   a. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

KESIMPULAN

Dari Evaluasi Kinerja dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dapat disimpulkan bahwa :

1. Evaluasi Kinerja Aksi Kegiatan atas Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk :

   a. Sasaran Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni :

      1.1 Indikator Persentase pengurangan backlog rumah dengan tingkat capaian kinerja pada tribulan III sebesar 165,00%.

      1.2 Indikator Persentase pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dengan tingkat capaian kinerja pada tribulan III sebesar 141,11%.

      1.3 Indikator Persentase perbaikan rumah dan kawasan permukiman kumuh dengan tingkat capaian kinerja pada tribulan III sebesar 6,32%.

      1.4 Indikator Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU dengan tingkat capaian kinerja pada tribulan III sebesar 101,57%

      1.5 Indikator Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman yang ditingkatkan, masih belum ada hasil.

   b. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Masalah Pertanahan :

      1.1 Indikator Presentase Sengketa Tanah Garapan yang Terselesaikan, dengan tingkat capaian kinerja pada tribulan III sebesar 10,43%.

      1.2 Indikator kinerja Persentase perencanaan penggunaan tanah dengan tingkat capaian kinerja pada tribulan III sebesar 39,40%.

HAMBATAN/KENDALA

1. Sosialisasi proses Sertifikasi dan Registrasi pengembang perumahan yang kurang di tingkat daerah serta pengembang sudah merasa terdaftar di tingkat pusat atau Kementerian PUPR.
2. Sosialisasi aplikasi Si Omah belum terlaksana.
3. Adanya penerima bantuan yang mengundurkan diri dari program, karena berbagai alasan : sakit, meninggal, tanah sengketa, tidak ditempat dll sehingga anggaran bantuan sosial belum terealisasi secara keseluruhan.
4. Penyelesaian kecukupan persyaratan administrasi konsolidasi tanah (PPTPKH) oleh KLHK/Dishut memerlukan waktu yang lama.
5. Masih Berlangsungnya Proses Pengadaan Tanah Tol Kertosono-Kediri, Sehingga Penyerapan Seiring Dengan Kegiatan Lapangan/Koordinasi Yang Dilakukan.

REKOMENDASI

1. Perlu Koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian PUPR selaku pembuat peraturan agar lebih memahami untuk menerapkan proses sertifikasi dan registrasi pengembang, selain itu perlu dilakukan sosialisasi ke pengembang tentang PermenPUPR No.18 tahun 2018.
2. Pengembangan aplikasi/ sistem informasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang lebih efektif dan efisien.
3. Perubahan SK Bupati tentang penetapan penerima bantuan baru (pengganti penerima manfaat).
4. Koordinasi yang baik dengan pihak eksternal (KLHK, Dishut) terkait dengan urusan perencanaan penggunaan tanah (TMHK/IPPKH) agar Kewajiban Pokok PSDH, DPEH, Biaya Investasi Perhutani Atas TMKH Lahan Semantok Dan Lahan Selopuro segera terbayarkan.
5. Agar Pembayaran Ganti Untung Bagi Warga Terdampak Tol Kertosono - Kediri Dapat Segera Dilaksanakan.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PRKPP

AGUS FRIHANNEDY,S.Pd.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640901 198703 1 013